

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
DI KOTA SUKABUMI
(STUDI KASUS KECAMATAN CITAMIANG)**

**Siti Aminah Azzahra
Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi
azzhraminah01@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul implementasi program kota tanpa kumuh (Kotaku) dengan studi kasus di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Kotaku di Kecamatan Citamiang dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikannya dengan menggunakan enam dimensi yang ada dalam teori Van Metter dan Van Horn. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPUPRKP2). Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Subjek yang dijadikan informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, display data dan penyajian data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi belum terlaksana dengan baik. Masih kurangnya sumber daya alam seperti fasilitas tanah. Selain itu masih terjadinya miskomunikasi yang diakibatkan dari kurangnya sosialisasi mengenai program Kotaku dan juga masih kurangnya pemahaman dari BKM mengenai pembuatan proposal dan RAB untuk program Kotaku. Saran penelitian bagi pihak Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman juga kepada pihak Fasilitator Kecamatan Citamiang yaitu harus meningkatkan kembali sosialisasi terkait program Kotaku dan meningkatkan kembali kelompok belajar proposal dan RAB dengan melaksanakan simulasi langsung.

Kata Kunci : Implementasi Program, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

ABSTRACT

The research is entitled The Implementation of City without Slum (Kotaku) Program conducting study case in Citamiang District, Sukabumi City. The research was aimed at determining the implementation of Kotaku Program in Citamiang District as well as finding out supporting and hampering factors of the implementation by applying six dimension theory from Van Metter and Van Horn. The research was conducted at Department of Public Works, Spatial Planning, Housing, Human Settlement and Land. The research was descriptive qualitative with study case design. Subjects were consisted of 7 informants. The techniques of collecting data applied were interview, observation and documentation. The techniques of analyzing data applied were data reduction, display and presentation. The result of the research shows that the implementation of city without slum program in Citamiang District, Sukabumi city has not been running optimally. Natural resource in terms of land facility is still lack. Thus, miscommunication caused by less socialization about the program and the lack of comprehension of the Community Self-Help Organization (BKM) about the program's proposal writing and budgeting is still likely to happen. Suggestion given for the

Head of Housing and Human Settlement Division as well as for Citamiang District Office as the facilitator is to improve the socialization related to Kotaku program while running direct simulation for proposal and budgeting study group.

KEYWORDS: *Program Implementation, City without Slums*

I. Pendahuluan

Pemukiman atau lebih khususnya perumahan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan penduduk, dimana kebutuhan dan perumahan akan terus menerus meningkat mengikuti pertumbuhan penduduk, terutama kota yang berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa setiap tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin sepenuhnya oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan perumahan di Indonesia adalah adanya pemukiman kumuh maupun pertumbuhan penduduk yang tidak sesuai dengan tata ruang. Penanganan pemukiman kumuh menjadi tantangan bagi pemerintah Kota/Kabupaten, karena semakin harinya jumlah tingkat kepadatan penduduk semakin bertambah yang mengakibatkan pula jumlah tempat tinggal bertambah namun dengan luas wilayah yang tidak berubah sehingga kepadatan pemukiman menjadi kumuh karena sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar khususnya pada wilayah kelurahan.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Penanganan pemukiman

kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang. Dengan itu Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia, dalam kurun waktu 5 tahun akan difokuskan untuk mewujudkan pemukiman yang layak huni. Dalam RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa sasaran perumahan dan pemukiman adalah tercapainya pengentasan pemukiman kumuh menjadi 0 (nol) hektar. Oleh karena itu Direktorat Jendral Cipta Karya mengatasi hal ini melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) melalui fasilitasi NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2).

Dapat diketahui bahwa di lingkungan kecamatan Citamiang masih banyak tempat-tempat yang kumuh, seperti drainase lingkungan nya yang masih sulit membuat pembuangan air secara alami atau buangan dari permukaan suatu tempat. Masih ada juga yang perlu ditangani dalam jalan lingkungan seperti jalan-jalan kecil yang sangat sempit sehingga menyulitkan para pengendara motor untuk berjalan.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan permasalahan/ fenomena yaitu:

Kurangnya sumber daya yaitu Sumber daya fasilitas dan masih kurangnya lahan atau tanah untuk pembuatan sumbor, septictankkomunal, drainase lingkungan dan pembangunan lainnya Karakteristik agen pelaksana yaitu adanya organisasi

formal dan organisasi informal terkait dengan pelaksanaan pembangunan program Kotaku. Adanya organisasi Kelompok Perawatan Pemanfaatan (KPP) yang berasal dari masyarakat setempat, akan tetapi tidak semua kelurahan memiliki organisasi informal atau KPP;

Kecenderungan para pelaksana yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat yang dilibatkan dalam program Kotaku, agen pelaksana yang dilibatkan dalam program Kotaku adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Diantaranya masih ada beberapa masyarakat yang kurang paham, misalnya belum memahami tata cara pembuatan RAB.

Komunikasi antara organisasi dan aktivis pelaksana yaitu terjadinya miskomunikasi antara Kecamatan dan BKM itu yang tidak saling bersinergis sehinggasebagian masyarakat pun tidak mengetahui adanya program Kotaku.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat Karena masyarakat lebih menyukai kegiatan kesehariannya dibandingkan ikut serta dalam kegiatan program Kotaku.

Fokus masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana implementasi program kota tanpa kumuh di Kecamatan Citamiang serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi, faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi program Kotaku di Kecamatan Citamiang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmu untuk memahami teori dan wawasan dalam pemahaman implementasi dalam bidang ilmu administrasi publik.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi

Dalam Purwanto (2015:21) implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Sementara itu Gunn dan Hoogwood dalam Tahir (2015:55) mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial. Sehubungan dengan itu Nugroho mengartikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

B. Kebijakan

Kebijakan publik menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2014:7) mengemukakan bahwa dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sementara itu menurut Davis dan Brigman dalam Suharto (2007:05) kebijakan public pada umumnya mengandung pengertian mengenai "*whatever government choose to do or not to do*". Artinya kebijakan public adalah "apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan".

Kadang-kadang kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan

tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, atau kesejahteraan. Urusan-urusan yang menyangkut kelistrikan, air, jalan raya, sekolah, rumah-sakit, perumahan rakyat, lembaga-lembaga rehabilitasi sosial adalah beberapa contoh yang termasuk dalam bidang kebijakan publik.

C. Implementasi Kebijakan

Daniel Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Sedangkan Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2014:139) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Mengenai implementasi kebijakan ini Van Metter & Van Horn dalam Agustino (2014:142) bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu :

Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang

realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan public hingga titik yang dapat dikatakan berhasil;

Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah: sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu;

Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan public. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Implementasi kebijakan publik berusaha untuk merubah perilaku atau tinkahlaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen

pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran pertama;

Sikap Kecenderungan para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan;

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivis Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalah-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya;

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi public dalam perspektif yang ditawarkan Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Upaya untuk mengimplementasikan kebijakannya harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

D. Kotaku

Menurut Abraham di dalam Kuswartojo (2005:3) bahwa perumahan bukan hanya lindungan, tetapi merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan keseluruhan lingkungan sosial.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Pemukiman dijelaskan bahwa Pemukiman Kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Program Kotaku adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan pemukiman kumuh kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan program ini untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Manfaat program ini yaitu bias meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh (drainase, air bersih/air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau untuk publik). Target program ini yaitu menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infastruktur dan pelayanan perkotaan

yang lebih baik sehingga penerima manfaat terpenuhi.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah. Menurut Denzin dan Lincon dalam Dja'man dan Aan (2013: 23) metode penelitian kualitatif adalah: "Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif". Pada penelitian ini yang menjadi indikator penelitian adalah berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan program Kotaku. Implementasi kebijakan program Kotaku ini merupakan cara peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh dan menurunnya luasan kawasan kumuh. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan metode purposive sampling, yang artinya bahwa penentuan informan penelitian ini berdasarkan pertimbangan tertentu yang peneliti tentukan sendiri dan peneliti anggap informan yang telah ditentukan mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dan relevan dengan fokus masalah yang peneliti akan lakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan ketiga triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik agar dalam penelitian ini dapat validitas yang akurat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi untuk mengetahui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh. Dengan menggunakan grand teori Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam dimensi yaitu:

Ukuran dan Sasaran Kebijakan

Program Kotaku terlaksana sesuai keputusan yang tercantum dalam SK Nomor 61 tahun 2015 tentang lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di wilayah Kecamatan Citamiang. Jika dilihat dalam variabel ini bahwa sasaran dan tujuan kebijakan sesuai dengan teori itu sudah terlaksana dengan baik.

Sumber-Sumber Kebijakan Sumber-sumber kebijakan dapat dinyatakan dengan cukup baik, sebab terkait sumber daya manusia sudah melengkapi akan tetapi kendala dan hambatan pada program ini yaitu kurangnya lahan yang memadai sehingga sulit untuk melakukan pembangunan program Kotaku.

Komunikasi antar Organisasi Pelaksana Kegiatan

Komunikasi antar instansi pelaksana dilakukan dengan baik akan tetapi terkait komunikasi antar instansi dan masyarakat belum berjalan dengan baik karena pihak kecamatan yang tidak bersinergis dengan BKM.

Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam pelaksanaan pembangunan Kotaku adanya organisasi KPP yaitu kelompok perawatan dan pemanfaatan pembangunan program Kotaku. Namun belum semua kelurahan memiliki organisasi

informal yang menjadi tanggung jawab atas perawatan dan pemanfaatan pembangunan program Kotaku.

Kecenderungan Pelaksana

Pemerintah maupun fasilitator sudah memperhitungkan konsekuensinya apabila pelaksana BKM tidak memahami aturan atau kebijakan program Kotaku. Untuk menghindari kesalahan pemerintah dan fasilitator mengadakan seminar pembelajaran mengenai penyusunan profosal dan RAB kepada anggota BKM.

Kondisi-Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Belum adanya dukungan dalam bidang sosial dan ekonomi. Sedangkan dalam bidang politik dilihat dalam segi pemerintah yang mendukung penuh akan terlaksananya program Kotaku dengan mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan wilayah kumuh.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis data dan pembahasan mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Sukabumi (Studi Kasus di Kecamatan Citamiang) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Sukabumi (Studi Kasus Kecamatan Citamiang) dapat diuraikan sebagai berikut:

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yaitu masih terdapat ketidak sesuain dengan wilayah kumuh yang ada di Kecamatan Citamiang akan tetapi pemerintah telah memprioritaskan wilayah yang layak mendapatkan program Kotaku dan di sah kan melalui SK.

Sumber-sumber kebijakan yaitu masih kurangnya fasilitas fisik dan sumber

daya alam sehingga program Kotaku belum berjalan dengan optimal

Komunikasi antar organisasi yaitu dalam hal sosialisasi mengenai program Kotaku yang belum dilaksanakan secara merata kepada masyarakat Kecamatan Citamiang, sehingga menimbulkan beberapa miskomunikasi Karakteristik Badan-badan pelaksana yaitu adanya organisasi formal dan organisasi informal terkait dengan pelaksanaan pembangunan program Kotaku. Organisasi formal terkait instansi dinas, fasilitator kecamatan dan BKM kelurahan dan selanjutnya terkait organisasi informal dalam pelaksanaan pembangunan program Kotaku yaitu adanya organisasi informal yang berasal dari masyarakat setempat, akan tetapi tidak semua kelurahan memiliki organisasi informal Kecenderungan pelaksana yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat yang dilibatkan dalam program Kotaku yaitu anggota BKM yang masih belum memahami tata cara penyusunan proposal dan RAB.

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu dalam segi ekonomi kurangnya minat dari masyarakat sekitar karena mengharapkan upah, dalam segi sosial dikarenakan masyarakat setempat lebih memilih kegiatan kesehariannya sehingga sulit mengikuti pelaksanaan program Kotaku, sedangkan segi politik adanya dukungan dari pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Bandung :Alfabeta
- Hasibuan, Malayu. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta-Gava Media

- Kuswartojo, Juck. 2005. Perumahan dan Pemukiman Indonesia. Bandung : ITB
- Purwanto, Erwan & Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media Rachmawati
- Ike, dkk. 2018. Pedoman Penelitian Ristik dan Skripsi. Sukabumi: Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora.
- Ruslan, Rosady. 2014. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi Dan Aplikasi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Satori,, Djaman. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharto. Edi. 2007 Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik, Transparansi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta
- Winarno, Budi 2014. Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Buku Seru
- Halimah, Siti. 2018. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Studi Kasus Rusunawa Cikundul. Sukabumi). Sukabumi : Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Widiyanti, Imas. 2018. Implementasi Program Kotakudalam Menyelesaikan Lingkungan Kumuh di Kricik Yogyakarta. Yogyakarta : Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Zuhrya, Almas. 2017. Peranan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Sebagai Media Pendidikan Sosial untuk Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi. Malang : Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.